



Sinkronisasi Tata Kelola

GUBERNUR DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengadakan pertemuan dengan kepala daerah kota/ kabupaten di DIY di Nda-lem Ageng, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/7). Persoalan sampah di wilayah DIY menjadi pembahasan utama.

Sultan menyampaikan, koordinasi ini satu di antaranya membahas kerja sama dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema *Public Private Partnership*.

Melalui kerja sama dengan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) dalam menangani sampah.

“Jadi kami punya kerja sama dengan departemen (kementerian) keuangan untuk pembiayaan lewat PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia),” ujar Sultan.

Lebih jauh, Ngarsa Dalem juga menjelaskan bahwa terdapat dua

● ke halaman **11**

Sinkronisasi

● Sambungan Hal 1

hal penting dalam penanganan sampah di wilayah DIY. Pertama, peran masyarakat dalam mengolah atau memilah sampah di tingkat rumah tangga.

“Saya berharap warga masyarakat yang sekarang mau mengelola sampah jangan meninggalkan pemulung karena pemulung juga butuh makan. Jangan yang jadi pemulung warga masyarakat di kelurahan tapi harus kerja sama dan itu nanti diolah,” kata Sultan.

Lalu, sampah yang telah dipilah akan dibawa ke *Interme-*

diated Treatment Facility (ITF) pusat karbonasi di Bawuran, Pleret, Bantul. ITF akan mengolah sampah menjadi kompos, panel-panel, hingga bahan baku furniture yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

“(sampah) Masuk ke Bawuran jadi bahan baku, berproses menjadi barang lain itu per tonnya dihargai Rp450 ribu,” tambah Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menambahkan, Pemda DIY membutuhkan dukungan para pemangku kebijakan di setiap daerah.

“Kami cek betul pengem-

banan peta jalannya masing-masing kabupaten/kota, progres TPS3R-nya seperti apa, mampu berapa volumenya, targetnya berapa, jadi nanti apakah titik tertentu mampu diselesaikan oleh Pemkab atau kerja sama antar kab/kota,” jelasnya.

Terkait untuk ITF Bawuran, kata Beny membutuhkan sedikitnya Rp400 miliar biaya pembangunan untuk bisa beroperasi. Kerja sama dengan pihak ketiga sifatnya berbentuk pendanaan hijau.

Hanya saja, perlu penyertaan dana dari pemerintah setempat sebesar 20 persen. Pemkab Bantul pun perlu du-

kungan pihak lain untuk menyelesaikan itu. “Pendanaan hijau dari Amerika Serikat yang kemudian kerja sama dengan Taiwan,” katanya.

“20 persen dari pemerintah daerah itu kan sangat besar, makanya Pemkab Bantul perlu pihak lain,” jelas Beny.

Beny mengatakan, PT PII tidak secara langsung memberikan uang, namun dengan pendampingan teknis, manajemen, dan penjaminan. “Masing-masing Kabupaten/kota sedang menyusun peta jalan agar sejalan dengan tata kelola dari PII, termasuk bisa mencari sumber dana,” tuturnya. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005